

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Sistem digunakan untuk mendukung keputusan dan kegiatan operasi sehari-hari. Sehingga membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan bertanggung jawab. Salah satu bentuk sistem yang digunakan oleh sebuah lembaga pemerintahan adalah sistem pengadaan barang persediaan langsung. Penerapan sistem pengadaan barang persediaan pada suatu lembaga pemerintahan sangat penting adanya, mengingat pengadaan barang yang dilaksanakan ini bertujuan untuk dapat mempertahankan agar fasilitas yang ada dalam lembaga pemerintahan tersebut dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah erat kaitannya dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah mengacu pada Peraturan Presiden 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sistem pengadaan barang/jasa pemerintah terbagi menjadi beberapa metode yakni *e-purchasing*, penunjukan langsung, pengadaan langsung, tender, dan tender cepat. *e-purchasing* yaitu membeli barang/jasa melalui sistem elektronik, sedangkan penunjukan langsung merupakan metode yang digunakan ketika karakter khusus atau dalam keadaan tertentu pada barang yang ingin diadakan, pengadaan langsung adalah metode yang digunakan untuk pengadaan ataupun jasa dengan nilai tidak besar dan biasanya tidak melebihi 200 juta rupiah, tender merupakan pencarian mitra untuk proyek yang diadakan oleh pihak penyelenggara, dan tender cepat yaitu metode saat pemilihan penyedia barang/konstruksi/jasa lainnya dengan memanfaatkan sistem informasi kinerja penyedia.

Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI merupakan satuan kerja pada lembaga tinggi Mahkamah Agung di bawah naungan Mahkamah Agung RI yang memiliki beberapa fungsi salah satunya sekretariat yang berfungsi untuk menghimpun kebutuhan pengadaan dari fungsi lainnya. Hal ini menjadi salah satu yang perlu diperhatikan oleh sebuah lembaga pemerintahan yaitu pengadaan barang persediaan langsung. Barang persediaan digunakan sebagai penunjang fasilitas kantor dan menjadi kebutuhan penting bagi lembaga untuk menjalani kegiatan yang berlangsung.

Pengadaan Barang Persediaan langsung merupakan salah satu bentuk sistem pengeluaran kas yang mengatur tatacara pengadaan barang dan jasa yang diperlukan oleh pemerintah. Pengadaan barang biasanya perlu mengeluarkan kas yang besar. Hal ini membuat Sekretariat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI harus lebih memperhatikan pengendalian internal pada pengadaan pembelian barang persediaan agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan, pelaporan dan lainnya. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul tugas akhir **“Sistem Pengadaan Barang Persediaan Langsung pada Sekretariat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengidentifikasi rumusan masalah yang diantaranya sebagai berikut :

1. Apa saja kebijakan yang digunakan oleh Sekretariat Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI terkait pengadaan barang persediaan langsung?
2. Apa saja fungsi yang terlibat pada proses pengadaan barang persediaan langsung?
3. Apa saja dokumen dan pencatatan akuntansi yang digunakan pada proses pengadaan barang persediaan langsung?
4. Bagaimana prosedur beserta bagan alir (*flowchart*) pengadaan barang persediaan langsung pada Sekretariat Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI?
5. Bagaimana sistem pengendalian internal yang terdapat dalam pengadaan barang persediaan langsung pada Sekretariat Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI?

## 1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan tugas akhir saya pada Sekretariat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI adalah :

1. Menguraikan kebijakan yang digunakan oleh Sekretariat Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI terkait pengadaan barang persediaan langsung.
2. Menguraikan fungsi yang terlibat pada proses pengadaan barang persediaan langsung.
3. Menguraikan dokumen dan pencatatan akuntansi yang digunakan pada proses pengadaan barang persediaan langsung.
4. Menjelaskan prosedur beserta bagan alir (*flowchart*) pengadaan barang persediaan langsung pada Sekretariat Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI.
5. Menjelaskan sistem pengendalian internal yang terdapat dalam pengadaan barang persediaan langsung pada Sekretariat Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI.

## 1.4 Manfaat

Manfaat yang akan diperoleh dari penulisan tugas akhir saya pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI adalah :

1. Bagi Sekolah Vokasi IPB  
Dapat membangun relasi antara Sekolah Vokasi IPB dengan pihak instansi, mempersiapkan lulusan yang berkompeten dan berkualitas, serta menjadi bahan referensi untuk perpustakaan Sekolah Vokasi IPB.
2. Bagi Lembaga Instansi  
Dapat menjadi tambahan informasi dan bahan masukan terkait dalam menjalankan kegiatan kedepannya.
3. Bagi Pembaca  
Agar dapat ngembangkan suatu informasi terkait pengadaan barang dan di harapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah dan mencoba menemukan sesuatu yang belum didapat dari pendidikan formal.